



DOKUMEN RENSTRA ::::: **2025 - 2029**



KONTAK KAMI:

📍 Jl. Prof. Dr. Soeharso Nomor 45 Purwokerto

✉️ dinporabudpar@banyumaskab.go.id

🌐 dinporabudpar.banyumaskab.go.id

☎️ (0281) 637 629

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Kepala daerah terpilih Kabupaten Banyumas hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang telah dilantik tanggal 20 Februari 2025 untuk periode jabatan Tahun 2025–2029 berkewajiban menyusun RPJMD sesuai periode jabatannya selambat-lambatnya 6 bulan sejak kepala daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan tahap RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 periode ke-1.

RPJMD Kabupaten Banyumas memiliki kedudukan yang sangat strategis dan akan menentukan masa depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan keberlanjutan masyarakat dan Kabupaten

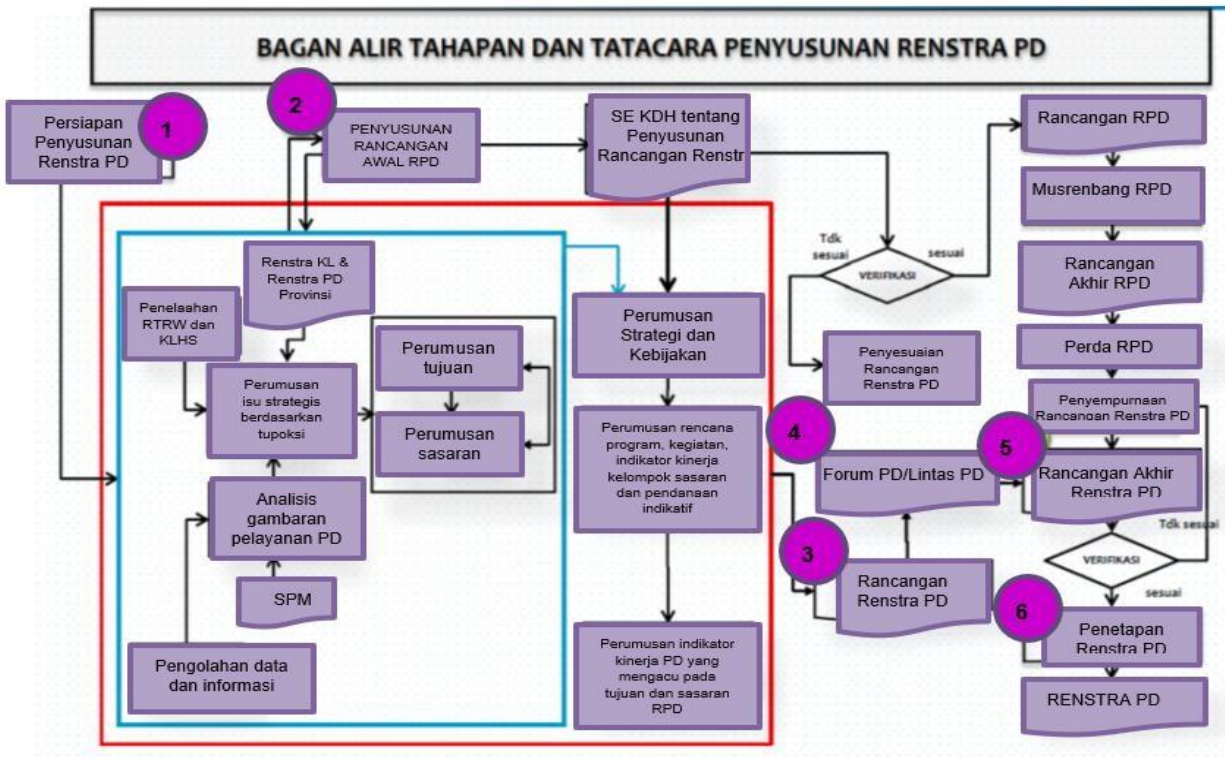
Banyumas di masa yang akan datang. RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Ranwal Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Ranwal Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Tahun 2025-2029 (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinporabudpar dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Dinporabudpar telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Telaah Renstra Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Tahapan penyusunan Renstra Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyusunan Renstra Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dimulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah:(9-221/2024), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2045;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan dan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinporabudpar;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinporabudpar Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasae hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinporakraf Kabupaten Banyumas, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Telaah Renstra Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINPORABUDPAR KABUPATEN BANYUMAS

2.1 Gambaran Pelayanan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinporabudpar Kab.Banyumas

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Dinas

Uraian Tugas :

1. Kepala Dinas Merumuskan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;

3. Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata agar sasaran strategis dapat tercapai;
5. Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan, Bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
7. Menyelia melaksanakan kebijakan kesekretariatan, bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
8. Melaksanakan pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
9. Mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
10. Mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana operasional sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumusan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja sekretariat yang meliputi :
 - a) Perencanaan;
 - b) keuangan;
 - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d) organisasi dan tatalaksana;
 - e) kepegawaian;
 - f) pelayanan administrasi;
 - g) hukum;
 - h) kehumasan dan keprotokolan; dan
 - i) kearsipan dan perpustakaan,
6. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
7. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

9. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Kepemudaan

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana operasional Bidang Kepemudaan berdasarkan program Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kepemudaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumuskan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program Kerja bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait :
 - a) Perlindungan kepemudaan;
 - b) Pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
6. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
8. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Kepemudaan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;

9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Kepemudaan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Keolahragaan

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana operasional di Bidang Keolahragaan berdasarkan program Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Keolahragaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Keolahragaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumuskan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program Kerja Bidang Keolahragaan dalam pelaksanaan kewenangan :
 - a) Pembinaan olahraga prestasi dan pendidikan;
 - b) Pembinaan olahraga rekreasi dan masyarakat;
6. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Keolahragaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Keolahragaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
8. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Keolahragaan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Keolahragaan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kebudayaan

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana operasional di Bidang Kebudayaan berdasarkan program Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kebudayaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumuskan, mengoordinasi dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program Kerja Bidang Kebudayaan dalam pelaksanaan kewenangan :
 - a) Pengelolaan dan pelestarian nilai tradisi;
 - b) Kesenian; dan
 - c) Sejarah, purbakala dan permuseuman
6. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
8. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Kebudayaan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Kebudayaan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Bidang Kepariwisataan

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana operasional di Bidang Kepariwisataan berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kepariwisataan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kepariwisataan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kepariwisataan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merumuskan, mengkoordinasi dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Pariwisata dalam pelaksanaan kewenangan :
 - a) Pengembangan destinasi wisata;
 - b) Promosi dan pemasaran pariwisata; dan
 - c) Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif,
6. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Kepariwisataan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
7. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Kepariwisataan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

8. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Kepariwisata dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Kepariwisata serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Amanat peran tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinporabudpar Kabupaten Banyumas dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, dan Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

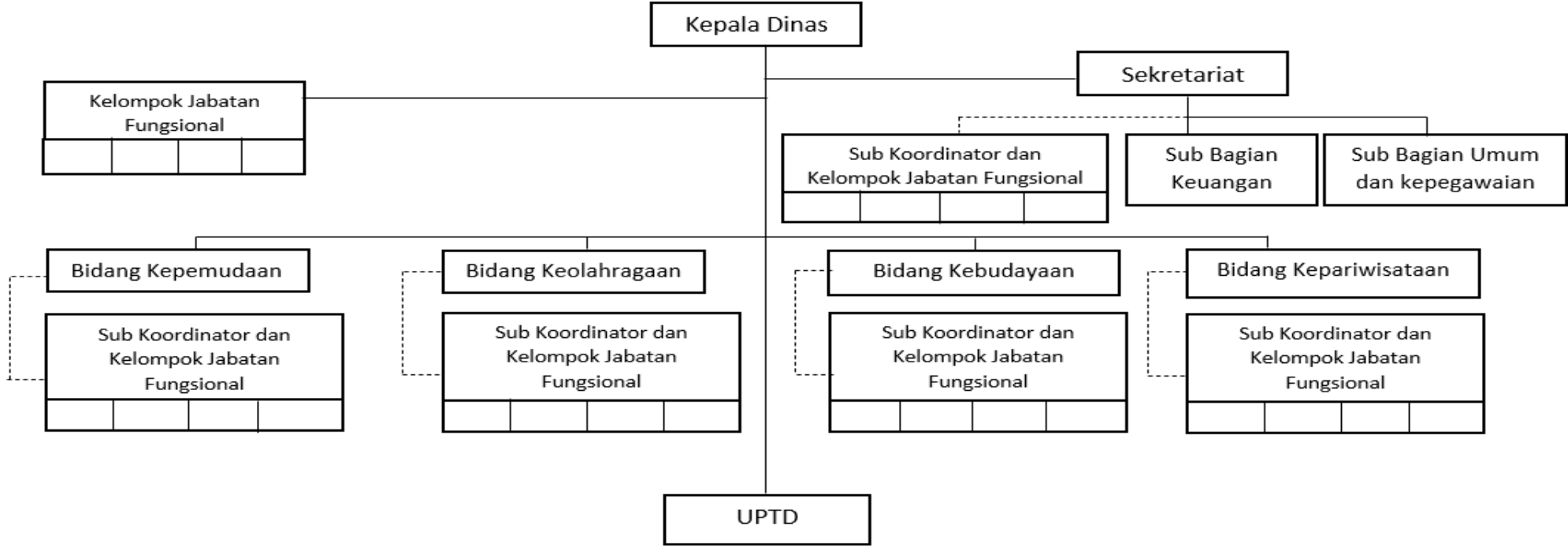
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan; dan
 2. Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Pembinaan Olahraga Prestasi dan Pendidikan;
 2. Sub Koordinator Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Masyarakat.
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pelestarian Nilai Tradisi;
 2. Sub Koordinator Kesenian; dan
 3. Sub Koordinator Sejarah, Purbakala dan Permuseuman.
- f. Bidang Kepariwisata, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Wisata;
 2. Sub Koordinator Promosi dan Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Sub Koordinator Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. UPTD; dan
- h. Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinporabudpar sebagaimana berikut :

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 106 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

GAMBAR 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas



Keterangan :

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

2.1.2 Sumber Daya Dinporabudpar Kabupaten Banyumas

Pegawai Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2025 sebanyak 232 orang, terdiri dari 87 ASN, 4 PPPK dan 141 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak SMA sejumlah 35 orang. Jumlah pegawai ASN/PPPK berdasarkan status kepegawaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	3	-	3	0,03
SMP	4	-	4	0,04
SMA	29	6	35	0,40
D-I	-	-	-	-
D-II	-	-	-	-
D-III	6	10	16	0,17
S-1	14	11	25	0,26
S-2	6	2	8	0,08
S-3	-	-	-	-
Jumlah	62	30	91	

Sumber: Data Kepegawaian ASN/PPPK Dinporabudpar Kab. Banyumas Tahun 2024

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas terbanyak adalah pegawai Golongan II (50,5%). Secara lengkap komposisi pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas berdasarkan golongan dapat dilihat tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Dinporabudpar Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)				TOTAL (ORANG)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	8	8	2	18
2	Bidang Kepemudaan	-	3	2	-	5
3	Bidang Keolahragaan	-	-	4	-	4
4	Bidang Kebudayaan	-	1	9	1	11
5	Bidang Pariwisata	-	2	7	1	10
6	UPTD Lokawisata Purwomas	-	6	3	-	9
7	UPTD GOR Satria Purwokerto	-	2	3	-	5
8	UPTD Lokawisata Baturraden	1	24	4	-	29
Jumlah Orang		1	46	40	4	91
Prosentase (%)		1,09	50,5	43,95	44,44	

Sumber: Data Kepegawaian ASN/PPPK Dinporabudpar Kab. Banyumas Tahun 2024

Adapun aset yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sejumlah **Rp185.699.763.043,5** (per-Desember 2024) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Aset

No	Kode Objek	Nama Objek	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	01	Tanah	12	92.394.523.627,0
2	02	Peralatan dan mesin	1.598	10.803.827.258,5
3		Alat Besar	25	874.336.760,0
4		Alat Angkutan	173	4.413.323.791,0
5		AlatBengkel dan Alat Ukur	23	101.910.500,0
6		Alat Pertanian	5	6.235.000,0
7		Alat Kantor dan Rumah Tangga	906	2.540.599.404,0
8		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	119	505.953.843,5
9		Alat Laboratorium	5	48.700.000,0
10		Komputer	198	1.301.477.373,0
11		Alat Keselamatan Kerja	5	40.400.000,0
12		Peralatan Olahraga	139	970.890.587,0
13	03	Gedung dan Bangunan	185	76.541.009.758,0
14		Bangunan Gedung	182	74.620.397.900,0
15		Monumen	3	1.920.611.858,0
16	04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	29	3.490.246.200,0
17		Jalan dan Jembatan	4	1.675.613.000,0
18		Bangunan Air	9	650.427.000,0
19		Instalasi	3	75.505.000,0
20		Jaringan	13	1.088.701.200,0
21	05	Aset Tetap Lainnya	1.452	2.470.156.200,0
22		Bahan Perpustakaan	804	294.904.000,0
23		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	648	2.175.252.200,0
24		Hewan		
TOTAL			3.276	185.699.763.043,5

Sumber: Data Aset Dinporabudpar Kab. Banyumas Per-Desember 2024 (Apk. Simbadamas)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas

Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda adalah pilar penting dalam pembangunan daerah. Pemuda memiliki potensi untuk mendukung kemajuan sosial, ekonomi, serta budaya. Saat ini kondisi kepemudaan di Kabupaten Banyumas menunjukkan kondisi yang cukup baik, meski masih memiliki tantangan dan peluang yang saling berkaitan.

Pada tahun 2024, tercatat pemuda berprestasi di Kabupaten Banyumas sejumlah 4 orang. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7 orang. Sementara itu, pemuda yang menjadi anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan justru mengalami peningkatan dan tercatat mencapai 54.650 orang. Hal ini menandakan, pemuda di Kabupaten Banyumas semakin aktif dalam organisasi kepemudaan, namun dukungan terhadap pengembangan keterampilan masih belum optimal, dilihat dari menurunnya prestasi pemuda pada tahun 2024. Berikut grafik pembangunan pemuda dalam lima tahun terakhir.

- Grafik Jumlah Pemuda Berprestasi Tahun 2020-2024



- Grafik Jumlah Pemuda yang menjadi anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Tahun 2020 - 2024



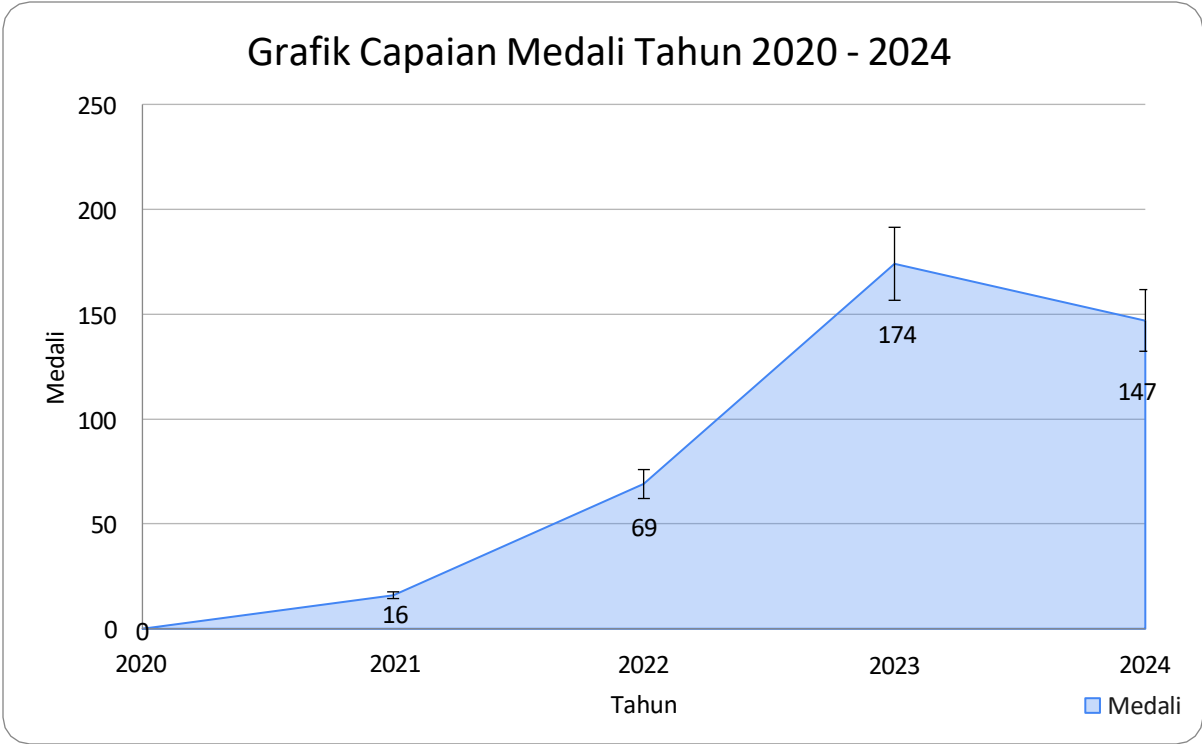
Daya saing pemuda juga dapat terwujud dengan melaksanakan pelatihan rintisan wirausaha muda. Pada tahun 2024, tercatat ada 112 pemuda yang menjadi wirausaha muda, menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat hanya 615 orang. Lebih lanjut, tercatat 148 pemuda telah ditingkatkan kapasitas daya saingnya. Adapun pelatihan yang dilakukan antara lain pendampingan kewirausahaan sebanyak 75 pemuda, pelatihan konten kreator untuk 46 pemuda, pelatihan digital marketing sebanyak 4 pemuda, dan pelatihan pemandu wisata untuk 23 pemuda. Banyaknya wirausaha muda yang terlahir pada tahun 2024 merupakan hasil sinergi yang harmonis dari pemangku kepentingan meliputi pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, serta media. Berikut grafik pemuda wirausaha yang dilatih dalam 5 tahun terakhir.

- Grafik Pemuda yang menjadi Wirausaha dalam 5 tahun terakhir



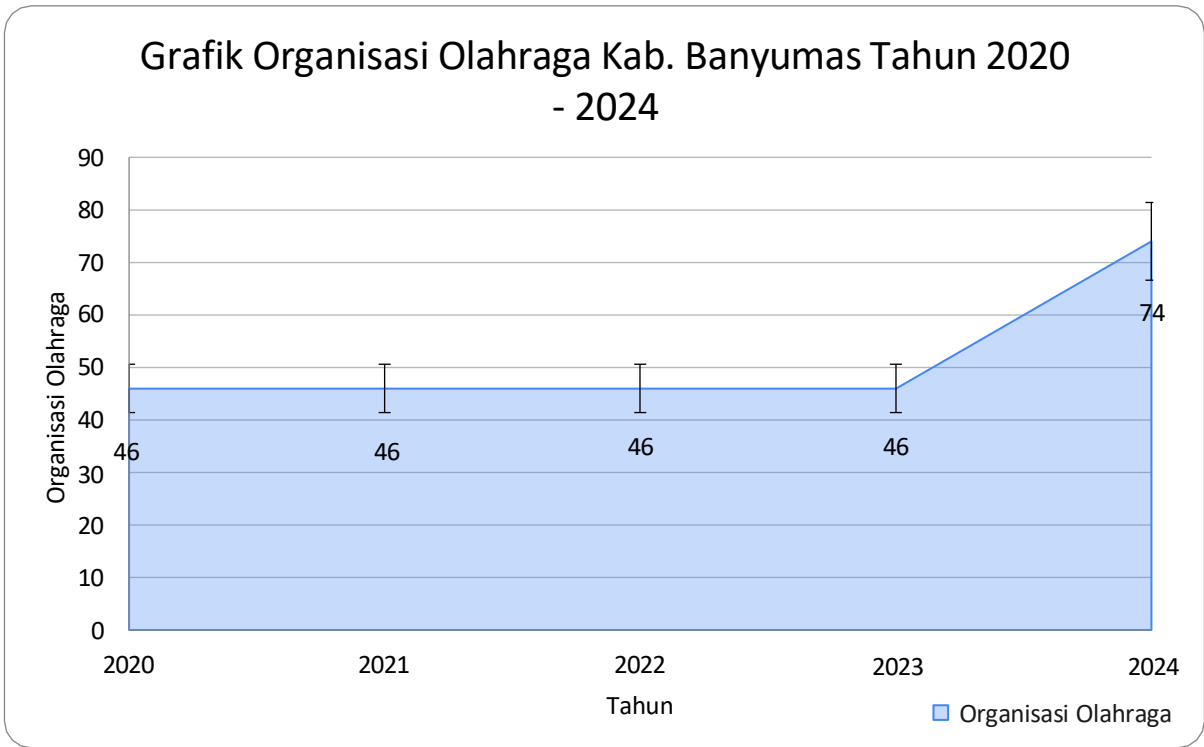
Selain pembangunan pemuda, guna meningkatkan daya saing generasi muda adalah dengan pembangunan olahraga. Selain dapat menyehatkan, olahraga dapat menumbuhkan jiwa kompetitif dan semangat berjuang. Pada tahun 2024, kondisi sektor olahraga di Kabupaten Banyumas cukup baik. Tercatat terdapat peningkatan prestasi di seluruh level dalam kompetisi olahraga yang diselenggarakan. Banyumas meraih total 147 medali, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 174 medali.

- Grafik Capaian Medali sejak Tahun 2020-2024

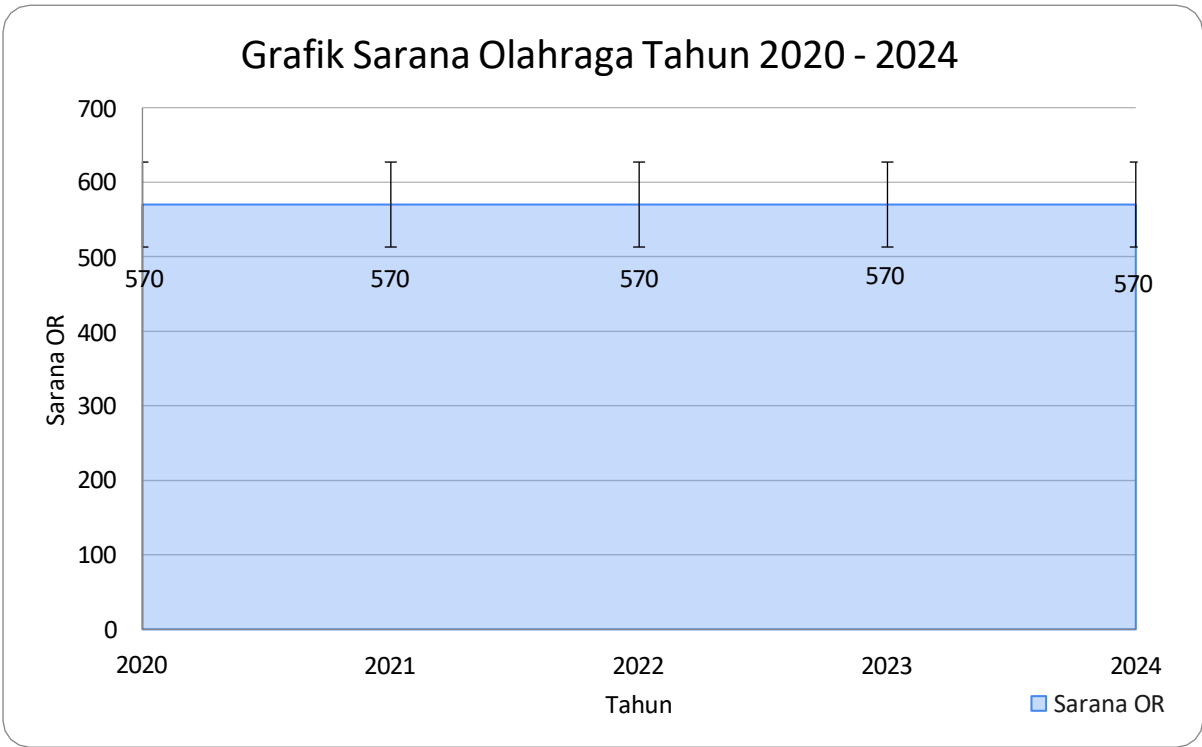


Pada tahun 2024, baik organisasi olahraga dan jumlah lapangan olahraga tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, organisasi olahraga yang tercatat sebanyak 74 organisasi. Sementara itu, jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 adalah 570. Jika dikaitkan dengan prestasi yang meningkat, perlu adanya peningkatan baik kelembagaan organisasi olahraga maupun sarana dan prasarana pendukung lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas.

- Grafik Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 202-2024



- Grafik Jumlah Lapangan Olahraga Banyumas Tahun 2020-2024



Urusan Bidang Kebudayaan

Pembinaan sejarah lokal di Kabupaten Banyumas masih tergolong minim. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak melakukan pembinaan sejarah lokal. Berbeda dengan tahun 2023, pembinaan sejarah lokal dilakukan 3 kali yaitu Sejarah Babad Pasir Luhur, Sejarah Kembaran, dan Sejarah Banyumas. Sementara, total sejarah lokal yang sudah diinventarisir adalah 18 sejarah lokal.

Selain sejarah lokal yang belum terbina dengan optimal, belum optimalnya sejarah lokal juga dapat dilihat dari jumlah pengunjung tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data, jumlah pengunjung tempat bersejarah relatif rendah yaitu dari lima belas tempat bersejarah di Kabupaten Banyumas hanya dikunjungi oleh 33.304 orang pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena tempat bersejarah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas belum mampu menarik pengunjung.

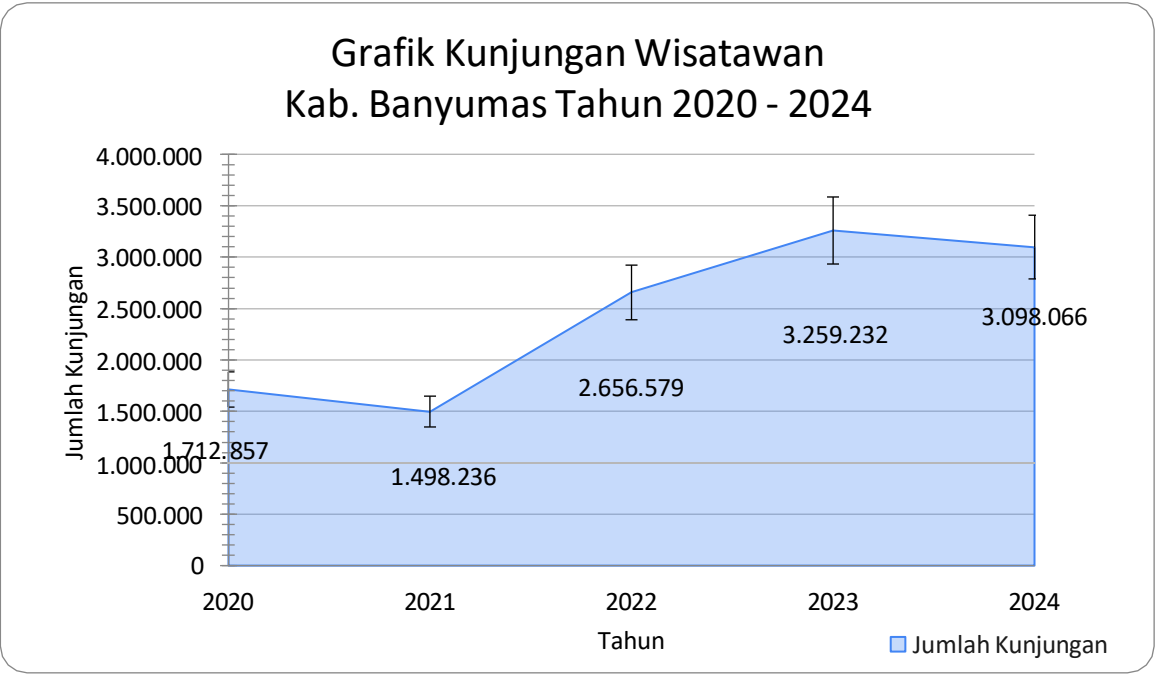
Perkembangan kesenian di Kabupaten Banyumas juga masih belum optimal. Kelompok kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas adalah 100 kelompok, dan hanya 50 kelompok atau 50% dari kelompok kesenian tersebut yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir.

Urusan Bidang Pariwisata

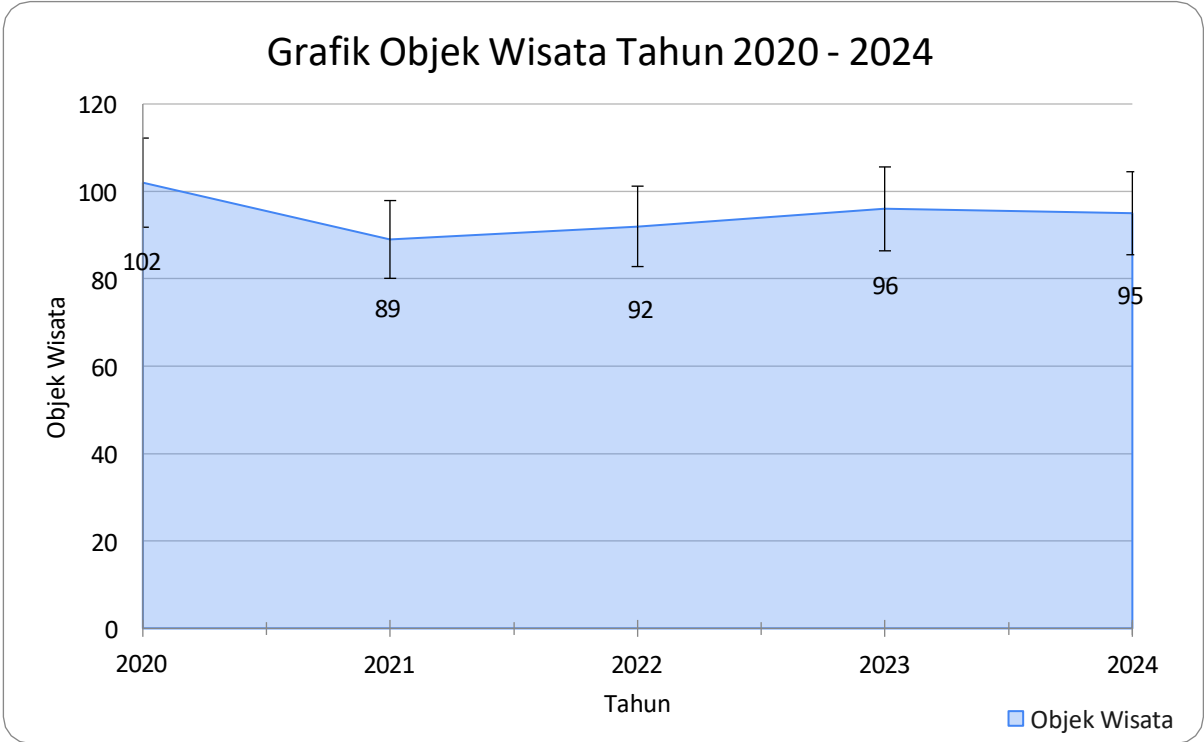
Pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Tidak hanya sebagai penghasil pendapatan daerah, berkembangnya objek wisata mendorong berkembangnya sektor lain seperti industri kerajinan, kuliner, usaha penyediaan makan minum, dan penginapan. Secara umum, berkembangnya sektor pariwisata akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar objek wisata.

Dalam lima tahun akhir, perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan sejak tahun 2021. Pada tahun 2024, kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara total 3.098.066 orang. Jika dibandingkan tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 4,95%. Jumlah objek wisata juga mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu 95 objek wisata. Objek wisata dengan pengunjung terbanyak adalah Lokawisata Baturraden, Hutan Pinus Limpakuwus dan Taman Apung Mas Kemambang. Dari banyaknya kunjungan yang ada, terjadi ketidakmerataan kunjungan wisatawan dan hanya terpusat pada wilayah utara (Baturraden dan Sumbang). Lebih lanjut, jika dilihat dari jenis daya tarik wisata yang paling banyak dikunjungi, Banyumas masih bertumpu pada wisata alam.

- Grafik Kunjungan Wisata Banyumas Tahun 2020-2024



- Grafik Jumlah Objek Wisata di Banyumas Tahun 2020-2024



Meningkatnya kunjungan wisatawan tidak lepas dari banyaknya event yang diselenggarakan pada tahun 2024. Total terselenggara 47 event dan mencapai 747.956 kunjungan. Event dengan antusiasme tertinggi adalah Kirab Hari Jadi Kabupaten Banyumas, Karnaval Kendaraan Hias, Festival Kenthongan, dan Banyumas Aesthetic Kota Lama. Selain itu, beberapa event skala Provinsi dan Nasional juga diselenggarakan diantaranya 10.000 Lengger Bicara, Purwokerto Half Marathon Run, dan Karnaval SCTV. Event kebudayaan dan olahraga masih menjadi daya tarik bagi wisatawan terutama wisatawan dari luar Kabupaten Banyumas. Kebudayaan Banyumas yang khas dan beragam menjadi nilai pengalaman tersendiri bagi wisatawan, selain itu infrastruktur dan fasilitas umum yang lengkap juga mendukung tumbuhnya event yang ada di Kabupaten Banyumas.

Alternatif daya tarik wisata yang bisa turut mendorong peningkatan kunjungan wisatawan adalah Desa Wisata. Kabupaten Banyumas memiliki 20 Desa Wisata, menurun dibandingkan tahun 2023 yaitu 21 Desa Wisata. Berikut Desa Wisata yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024.

Tabel Desa Wisata di Banyumas tahun 2024

No	Nama Desa Wisata	Kecamatan	No SK	Tgl Penetapan SK	Klasifikasi
1	Banjarpanepen	Sumpiuh	556/174/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Rintisan
2	Cikakak	Wangon	556/166/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Maju
3	Cirahab	Lumbir	556/173/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Berkembang
4	Gerduren	Purwojati	556/169/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Berkembang
5	Kalibagor	Kalibagor	556/178/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Rintisan
6	Kalisalak	Kebasen	556/172/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Berkembang
7	Karanggintung	Kemranjen	556/177/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Rintisan
8	Karangkemiri	Karanglewas	556/170/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Berkembang
9	Karang Tengah	Cilongok	556/175/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Rintisan
10	Karang Salam	Baturraden	556/167/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Berkembang
11	Melung	Kedung Banteng	556/167/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Berkembang
12	Petahunan	Pekuncen	556/171/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Berkembang
13	Samudra	Gumelar	556/179/Tahun 2020	20 Maret 2020	Desa Wisata Rintisan
14	Kemutug Lor	Baturraden	556/791/Tahun 2020	15 September 2020	Desa Wisata Berkembang
15	Kejawar	Banyumas	556/841/Tahun 2021	17 Desember 2021	Desa Wisata Rintisan
16	Pekunden	Banyumas	556/842/Tahun 2021	17 Desember 2021	Desa Wisata Rintisan
17	Tamansari	Karanglewas	556/743/Tahun 2022	17 November 2022	Desa Wisata Rintisan
18	Tambaknegara	Rawalo	556/1182/Tahun 2022	30 Desember 2022	Desa Wisata Rintisan
19	Pekuncen	Jatilawang	556/1181/Tahun 2022	30 Desember 2022	Desa Wisata Rintisan
20	Glempang	Pekuncen	556/1180/Tahun 2022	30 Desember 2022	Desa Wisata Rintisan

Dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan, potensi lain yang dapat dioptimalkan adalah Ekonomi Kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif dilaksanakan pada 17 subsektor yaitu : aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film/animasi/video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi/radio. Menurut data yang ditarik dari Online Single Submission (OSS), pelaku ekonomi kreatif mengalami peningkatan pada 2024 hingga 4,6% dengan jumlah 2.172 orang. Pelaku ekonomi kreatif yang tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat 2.076

orang (menggunakan perhitungan terbaru). Hingga akhir 2024, pendataan masih menggunakan penarikan data dari OSS sehingga diketahui masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang terdata terutama pelaku freelance dan pelajar yang tergabung dalam komunitas Ekraf.

Secara keseluruhan, pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik. Namun, perlu adanya penguatan infrastruktur pendukung seperti pemeliharaan daya tarik wisata, peningkatan akses angkutan pada daya tarik wisata dan desa wisata, serta diversifikasi atraksi wisata. Upaya yang dilakukan harus lintas sektoral sehingga dampak yang dirasakan akan lebih luas dan merata.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Gambaran Umum sasaran dan target kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari capaian indikator masing masing bidang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Bidang Pemuda dengan indikator :

- 1) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- 2) Persentase peningkatan wirausaha muda;
- 3) Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten

Bidang Olahraga dengan indikator :

- 1) Persentase peningkatan prestasi olahraga pemuda;
- 2) Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah program UPTD GOR Satria Purwokerto;

Bidang Kebudayaan dengan indikator :

- 1) Persentase peningkatan budaya yang menjadi daya Tarik wisata;
- 2) Persentase pembinaan Sejarah lokal;
- 3) Persentase cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Daerah;
- 4) Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Bidang Pariwisata dengan indikator :

- 1) Persentase peningkatan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata yang dikelola Pemda;
- 2) Persentase peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata;
- 3) Persentase peningkatan pelatihan pelaku ekonomi kreatif;
- 4) Persentase SDM Kepariwisata yang bersertifikat;
- 5) IKM Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;

Pencapaian kinerja Dinporabudpar Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada indikator kinerja dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Banyumas

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Target Akhir Renstra (2026)	Status Capaian
			Target	Realisasi			
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	Tercapai

[illegible]

1.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Daerah	%	42,50	48,33	46,32	104,34	Tercapai
VIII.	Program Pembinaan Sejarah						
1.	Persentase pembinaan Sejarah lokal	%	16,67	N/A	N/A	N/A	Tidak tercapai
IX.	Program Pengembangan Kebudayaan						
1.	Persentase peningkatan budaya yang menjadi daya tarik wisata	%	12,50	1,03	33,33	3,09	Tidak tercapai
X.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						
1.	Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten	%	1,72	4,90	6,56	74,7	Tidak tercapai
XI.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
1.	Presentase peningkatan prestasi olahraga pemuda	%	7,62	3,18	15,77	20,16	Tidak tercapai
XII.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
1.	Persentase Peningkatan Wirausaha Muda	%	17,50	111,42	34,33	324,56	Tercapai
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,41	0,31	0,43	72,09	Tidak tercapai

Capaian kinerja untuk urusan kepemudaan, Keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan tahun 2024-2026 dapat dilihat dari tabel 2.4 diatas. Secara umum menunjukkan hasil yang baik. Dari 12 capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 terdapat sepuluh (10) indikator kinerja yang telah melebihi target yang ditetapkan yaitu :

- ❖ Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan Tingkat Daerah Kabupaten Kota;
- ❖ Jumlah organisasi olahraga yang terbina;
- ❖ Jumlah kegiatan kepramukaan;
- ❖ Persentase Kebudayaan yang terlestarikan;
- ❖ Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah;
- ❖ Jumlah Festival event pariwisata yang dilaksanakan;
- ❖ Jumlah daya tarik wisata yang dikelola Pemda;
- ❖ Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi wisata;
- ❖ Jumlah Desa Wisata yang memiliki SK;
- ❖ Jumlah Pelatihan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Ada beberapa faktor pendukung pada indikator yang melebihi target diantaranya :

1. Beberapa event tingkat nasional yang terselenggara di Kabupaten Banyumas baik event olahraga maupun event Pariwisata;
2. Optimalnya SDM yang kompeten di dalam organisasi olahraga;
3. Optimalnya penyerapan anggaran terutama dana hibah untuk kegiatan kepramukaan;
4. Meningkatkan promosi wisata dan event di media sosial;
5. Mengoptimalkan potensi wisata milik desa;

Untuk faktor penghambat indikator yang tidak tercapai, diantaranya :

1. Indikator persentase peningkatan PAD pada daya tarik wisata yang dikelola Pemda penyebab target tidak tercapai karena adanya perubahan tarif masuk objek wisata yang dikelola Pemda (khususnya Taman Mas Kemambang), berdasarkan Tarif wisata ini telah turun sejak bulan September 2023 dan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, serta Surat Keputusan Kepala Dinporabudpar Kab. Banyumas Nomor : 000.8.32/225/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinporabudpar;
2. Indikator persentase peningkatan kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata penyebab kegagalan pencapaian target karena kurangnya inovasi dalam mengemas budaya tersebut menjadi suatu hal yang menarik atau membuat budaya tersebut menjadi sebuah pertunjukan yang memiliki daya tarik wisatawan.

No	Indikator Kinerja Program		Anggaran			Realisasi			Rasio (%)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
IX.	Program Pengembangan Kebudayaan										
	a.	Persentase peningkatan budaya yang menjadi daya tarik wisata	4.585.411.000	-	-	3.665.989.200	-	-	79,95	-	-
X.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan										
	a.	Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten	2.125.000.000	-	-	2.107.696.401	-	-	99,19	-	-
XI.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										
	a.	Presentase peningkatan prestasi olahraga pemuda	14.758.351.000	-	-	14.682.639.772	-	-	99,49	-	-
XII.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
	a.	Persentase Peningkatan Wirausaha Muda	320.992.900	-	-	300.298.200	-	-	93,55	-	-
	b.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	320.992.900	-	-	300.298.200	-	-	93,55	-	-

2.1.4 Kelompok Sasaran Dinporabudpar Kabupaten Banyumas

No	Kegiatan	Kelompok Sasaran
(1)	(2)	(6)
1	Workshop Produk Wisata	Pelaku Usaha Pariwisata
2	Workshop Technical Selling	Pelaku Usaha Pariwisata
3	Penyusunan Profil Wisata Edukasi	Pokdarwis
4	Kampanye Sadar Wisata	Pokdarwis
5	Pemberdayaan Desa Wisata	Pokdarwis
6	Pemberdayaan Pokdarwis	Pokdarwis
7	Pagelaran Wayang Kulit	Pepadi
8	Penyelenggaraan Duta Seni TMII	Sanggar kalamangsa, Sanggar Graha Mustika
9	Penyelenggaraan Duta seni tingkat Provinsi	Sanggar kalamangsa, Sanggar Graha Mustika
10	Festival Kesenian Langka	Pak Carlan
11	Penjamanan Pusaka	Pak Sungging
12	Workshop MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia)	Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia
13	Pelestarian lembaga adat	Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia
14	Registrasi dan Inventarisasi cagar budaya	Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia

15	Penyelenggaraan kajian cagar budaya	Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia
16	Penetapan cagar budaya	Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia
17	Pemasangan Plang cagar Budaya	Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia
18	Pemeliharaan Sarana Prasarana cagar Budaya	Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia
19	Penyelenggaraan Table Top atau Travel Mart	PHRI dan Pebemas

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinporabudpar Kabupaten Banyumas

2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Dinporabudpar Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berdasarkan evaluasi tersebut yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa permasalahan yang dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah terangkum sebagai berikut :

- a. Permasalahan Terkait Bidang Kepemudaan
 1. Pemuda wirausaha yang difasilitasi masih rendah;
 2. Keaktifan pemuda dalam organisasi belum optimal.
- b. Permasalahan Terkait Bidang Olahraga
 1. Keberhasilan pembangunan olahraga masih rendah;
 2. Pembinaan olahraga belum optimal;
 3. Belum adanya pusat pelatihan atlet.
- c. Permasalahan Terkait Bidang Kebudayaan
 1. Meningkatnya pengembangan kebudayaan;
 2. Jumlah pengunjung tempat bersejarah masih rendah;
 3. Kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir belum optimal;
 4. Terbatasnya fasilitas sarana pertunjukkan yang memadai;
 5. Pembinaan sejarah lokal masih belum optimal;
 6. Belum adanya catatan sejarah / narasumber lokal yang valid.
- d. Permasalahan Terkait Bidang Pariwisata
 1. Rata-rata lama menginap menurun;
 2. Kurangnya event yang dilaksanakan lebih dari satu hari;
 3. Ekosistem ekonomi kreatif yang belum berkembang;
 4. Pendataan pelaku ekonomi kreatif belum optimal;
 5. Jumlah daya tarik wisata menurun;
 6. Kurangnya kegiatan promosi secara langsung;
 7. Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf perlu ditingkatkan;
 8. Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM

2.2.2 Isu-isu Strategis

Dalam perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yang meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029, Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Telaah Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, sampai dengan tujuan akhir adalah penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

Beberapa isu-isu strategis yang menjadi isu Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Banyumas yang harus segera ditindaklanjuti untuk membangun Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan Pariwisata yang lebih baik, yaitu :

1. Penguatan Pembangunan Pemuda;
2. Meningkatnya Kunjungan Wisata;
3. Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan;
4. Penguatan Pembangunan Olahraga.

2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banyumas

Tabel 2.6

Isu Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Banyumas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Kawasan strategis bidang sosial dan budaya di wilayah Kabupaten Banyumas, meliputi : 1) Kawasan Kota Lama Banyumas 2) Kawasan Masjid Saka Tunggal (Ds.Cikakak, Kec.Wangon) 3) Kawasan Desa Tradisional (Ds.Plana, Kec. Somagede) 4) Kawasan Budaya Tradisional (Ds.Pekuncen, Kec.Jatilawang) 2. Kawasan wisata adalah kawasan dengan fungsi utama kegiatan pariwisata dengan sarana dan	1. Menurunnya prestasi pemuda; 2. Pertumbuhan kunjungan wisatawan melambat; 3. Belum optimalnya Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Banyumas; 4. Sarana dan prasarana pendukung olahraga stagnan.	Belum optimalnya Daya Saing, Produktivitas dan Keberlanjutan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional, Urban Sprawl, isu infrastruktur, lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola	-	1. Penguatan Pembangunan Pemuda; 2. Meningkatnya Kunjungan Wisata; 3. Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan; 4. Penguatan Pembangunan Olahraga

prasarana pendukungnya. Pengembangan kawasan ini harus melihat potensi yang dimiliki dan menjadi daya tarik konsumen wisata.						
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINPORABUDPAR KABUPATEN BANYUMAS

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada BAB II serta tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

3.1. Tujuan Jangka Menengah Dinporabudpar

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas adalah **“Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olahraga Serta Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata Berbasis Potensi Lokal Dan Kebudayaan”**.

3.2. Sasaran Jangka Menengah Dinporabudpar

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Dinporabudpar Kabupaten Banyumas diantaranya adalah:

- 1. Memperkuat Daya Saing Pemuda Dan Olahraga;**
- 2. Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan;**
- 3. Meningkatkan Pengembangan Pariwisata;**
- 4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian Dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target				
				2024	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olahraga Serta Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata Berbasis Potensi Lokal Dan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda Dan Olahraga	$\frac{[(PP+PO \text{ Tahun } N) - (PP+PO \text{ Tahun Dasar (2024)})] : (PP+PO \text{ Tahun Dasar (2024)}) \times 100}{}$ Ket: PP: Prestasi Pemuda PO: Prestasi Olahraga	%	3,18	4,79	9,25	13,36	17,47	21,58
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Tahun N : Total PDRB berlaku x 100	%	0,081	0,105	0,117	0,130	0,145	0,165
	Persentase Peningkatan Pemajuan Kebudayaan	$\frac{[(OKP \text{ Tahun } N - OKP \text{ Tahun Dasar (2024)})] : (OKP \text{ Tahun Dasar (2024)}) \times 100}{}$ Ket: OKP: Objek Kebudayaan yang dilakukan Pemajuan Kebudayaan meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, atau pembinaan	%	N/A	19,35	25,81	35,48	51,61	67,74

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2024	2026	2027	2028	2029	2030	
Menguatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Tingkat Prestasi Pemuda	Pemuda Berprestasi Tahun N Dibagi Pemuda Keseluruhan Pada Tahun N x 100	%	0,72	0,075	0,078	0,081	0,084	0,087	
	Tingkat Prestasi Olahraga	Perolehan Medali Tahun N : Jumlah Atlet Pada Tahun N x 100	%	0,021	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Tingkat Pemajuan Kebudayaan	Objek Kebudayaan yang dilakukan pemajuan pada tahun N : total seluruh kebudayaan pada tahun N x 100	%	59,62	71,15	75,00	80,77	90,38	100	
Meningkatnya Pengembangan Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Total Realisasi PAD Dari Sektor Pariwisata Tahun N : Total Realisasi PAD Tahun N X 100	%	6,21	6,71	7,39	8,15	8,97	9,54	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian Dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Capaian Sakip Perangkat Daerah Tahun Berjalan	Angka	87,40	87,60	87,70	87,80	87,90	88,00	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai Capaian SPIP PD Tahun Berjalan	Angka	3,40	3,53	3,55	3,75	3,80	4,00	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai IPP PD Tahun Berjalan	Angka	3,51	3,51	3,55	3,75	4,00	4,00	

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2025

3.3 Strategi Jangka Menengah Dinporabudpar

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan prestasi olah raga dan Peningkatan dukungan terhadap atlet;
2. Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga;
3. Pembangunan serta pemberdayaan, penguatan kapasitas, kemandirian dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
4. Pengembangan Pengusaha Muda di tiap Kecamatan;
5. Pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis Potensi dan budaya lokal;
6. Penguatan pemasaran pariwisata serta Pengembangan ekosistem wisata yang mengintegrasikan produk lokal, objek wisata dan atraksi budaya;
7. Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. Pengembangan klaster ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan ekonomi kreatif serta Pengembangan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal;
9. Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata;
10. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan Banyumas.

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Banyumas

URUSAN	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAPAH III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemasalan dan Pengembangan Olahraga Bagi Masyarakat melalui penyelenggaraan event serta pembinaan atlet dan SDM olahraga	Pemassalan dan pengembangan olahraga bagi Masyarakat melalui penyelenggaraan event serta pembinaan atlet dan SDM Olahraga	Pemassalan dan pengembangan olahraga bagi Masyarakat melalui penyelenggaraan event serta pembinaan atlet dan SDM Olahraga	Pemassalan dan pengembangan olahraga bagi Masyarakat melalui penyelenggaraan event serta pembinaan atlet dan SDM Olahraga	Pemassalan dan pengembangan olahraga bagi Masyarakat melalui penyelenggaraan event serta pembinaan atlet dan SDM Olahraga
	Revitalsiasi sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria	Revitalsiasi sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria	Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria	Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria	Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria
	Peningkatan keterlibatan organisasi dan fasilitasi kepeloporan pemuda	Peningkatan kapasitas pemuda dengan memperluas akses pelatihan dan apresiasi kepeloporan sebagai motivasi berkelanjutan	Peningkatan kapasitas pemuda dengan memperluas akses pelatihan dan apresiasi kepeloporan sebagai motivasi berkelanjutan	Peningkatan kapasitas pemuda dengan memperluas akses pelatihan dan apresiasi kepeloporan sebagai motivasi berkelanjutan	Peningkatan kapasitas pemuda dengan memperluas akses pelatihan dan apresiasi kepeloporan sebagai motivasi berkelanjutan
	Peningkatan kapasitas wirausaha muda melalui pemberian pelatihan dan kelas kewirausahaan berbasis potensi lokal dan digital	Peningkatan kapasitas wirausaha muda melalui pemberian pelatihan dan kelas kewirausahaan berbasis potensi lokal dan digital	Peningkatan kapasitas wirausaha muda melalui pemberian pelatihan dan kelas kewirausahaan berbasis potensi lokal dan digital	Peningkatan kapasitas wirausaha muda melalui pemberian pelatihan dan kelas kewirausahaan berbasis potensi lokal dan digital	Peningkatan kapasitas wirausaha muda melalui pemberian pelatihan dan kelas kewirausahaan berbasis potensi lokal dan digital
PARIWISATA	Penguatan pondasi pariwisata berbasis budaya dan alam melalui pengembangan destinasi, pembentukan desa wisata berbasis ekonomi kreatif, atraksi budaya desa, branding, serta pemetaan potensi wisata unggulan	Peningkatan kualitas daya tarik wisata dengan penguatan branding Banyumas, pelatihan SDM pariwisata, serta pembentukan desa wisata berbasis budaya yang didukung promosi dan event atraktif	Perluasan jangkauan pariwisata melalui peningkatan kolaborasi event, pengembangan paket wisata antar destinasi, serta pembentukan desa wisata berbasis kelestarian alam untuk memperkuat daya saing daerah	Penguatan ekosistem pariwisata melalui penyelenggaraan paket wisata terintegrasi (desa wisata, alam, budaya, kuliner, sport tourism) serta peningkatan klasifikasi desa wisata berkembang	Keberlanjutan dan penguatan branding pariwisata daerah dengan mengokohkan paket wisata terintegrasi, konsistensi penyelenggaraan event, dan pengembangan desa wisata berbasis kelestarian alam sebagai ikon Banyumas

	Penguatan citra pariwisata Banyumas melalui branding, promosi dalam-luar negeri, Optimalisasi badan/ tim promosi wisata, serta event budaya sebagai daya tarik unggulan	Penguatan pemasaran pariwisata dengan promosi terpadu, event atraktif, dan peningkatan peran influencer desa wisata	Perluasan promosi pariwisata melalui kolaborasi event dengan swasta dan pengembangan paket wisata antar destinasi	Penguatan promosi pariwisata melalui paket wisata terintegrasi (desa wisata, budaya, alam, kuliner, sport tourism) dengan kolaborasi multi stakeholder	Penguatan branding pariwisata Banyumas dengan ikon paket wisata terintegrasi dan event rutin sebagai daya tarik unggulan
	Pelatihan Influencer wisata untuk menuju 1 Influencer 1 Desa Wisata serta pemberian Awarding untuk Konten Kreator Wisata	Peningkatan kapasitas anggota dan pengurus Kelompok Sadar Wisata dan SDM Pariwisata	Peningkatan Aktivasi Badan Promosi Wisata (PHRI, Biro wisata dan Tour Guide, Komunitas Wisata lainnya, Tourism Information Center) dalam promosi wisata melalui event kebudayaan	Peningkatan kolaborasi dalam pengelolaan wisata daerah	Peningkatan kolaborasi dalam pengelolaan wisata daerah
	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pembentukan Klaster, Penguatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pembentukan Klaster, Penguatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pembentukan Klaster, Penguatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pembentukan Klaster, Penguatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pembentukan Klaster, Penguatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif
	Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Pengembangan PUD	Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Pengembangan PUD	Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Pengembangan PUD	Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Pengembangan PUD	Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Pengembangan PUD
KEBUDAYAAN	Pemetaan potensi seni dan budaya, inventarisasi kelompok seni serta penguatan awal perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi pelaku seni-budaya, penyelenggaraan festival tahunan, serta konsistensi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	Perluasan jangkauan kegiatan budaya melalui festival tingkat kecamatan dan kabupaten, didukung event kebudayaan dan penguatan perlindungan objek budaya	Penguatan ekosistem budaya dengan penguatan identitas daerah melalui festival tahunan di berbagai tingkatan, serta peningkatan kualitas perlindungan dan pengembangan objek budaya.	Keberlanjutan dan penguatan branding daerah berbasis budaya melalui festival budaya berjenjang dan konsistensi pemajuan objek kebudayaan

3.1.4. Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinporabudpar

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Event Olahraga
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan manajemen atlet
3. Revitalisasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
4. Pelatihan dan pendampingan Manajemen Bisnis untuk Pemuda Wirausaha dan Pemuda Pelopor
5. Penyelenggaraan Event Pariwisata
6. Pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis potensi dan budaya lokal
7. Pengembangan Ekosistem Wisata yang mengintegrasikan produk lokal, objek wisata, dan atraksi budaya
8. Promosi destinasi wisata hingga tingkat Internasional
9. Menciptakan 1 Desa Wisata 1 Influencer
10. Menciptakan 1 Desa Wisata berbasis kelestarian alam atau kebudayaan lokal
11. Fasilitasi Promosi Produk Kreatif Lokal
12. Pembinaan pelaku ekonomi kreatif sub sektor seni pertunjukan dan seni music
13. Penyelenggaraan event kebudayaan
14. Revitalisasi sarana dan prasarana kebudayaan
15. Fasilitasi penyelenggaraan pentas seni dan budaya lokal

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Urusan	Strategi	Penahapan Renstra Dinporabudpar					Arah Kebijakan
		2026	2027	2028	2029	2030	
Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olah raga dan Peningkatan dukungan terhadap atlet	Pemasalan dan Pengembangan Olahraga Bagi Masyarakat melalui penyelenggaraan event serta pembinaan atlet dan SDM olahraga					1. Penyelenggaraan Event Olahraga 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan manajemen atlet 3. Revitalisasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga 4. Pelatihan dan pendampingan Manajemen Bisnis untuk Pemuda Wirausaha dan Pemuda Pelopor
	Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga	Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria		Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di GOR Satria			
	Pembangunan serta pemberdayaan, penguatan kapasitas, kemandirian dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan keterlibatan organisasi dan fasilitasi kepeloporan pemuda	Peningkatan kapasitas pemuda dengan memperluas akses pelatihan dan apresiasi kepeloporan sebagai motivasi berkelanjutan				
	Pengembangan Pengusaha Muda di tiap Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Wirausaha Muda melalui pemberian pelatihan dan kelas kewirausahaan berbasis potensi lokal dan digital					

Pariwisata	Pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis Potensi dan budaya lokal	Penguatan pondasi pariwisata berbasis budaya dan alam melalui pengembangan destinasi, pembentukan desa wisata berbasis ekonomi kreatif, atraksi budaya desa, branding, serta pemetaan potensi wisata unggulan	Peningkatan kualitas daya tarik wisata dengan penguatan branding Banyumas, pelatihan SDM pariwisata, serta pembentukan desa wisata berbasis budaya yang didukung promosi dan event atraktif	Perluasan jangkauan pariwisata melalui peningkatan kolaborasi event, pengembangan paket wisata antar destinasi, serta pembentukan desa wisata berbasis kelestarian alam untuk memperkuat daya saing daerah	Penguatan ekosistem pariwisata melalui penyelenggaraan paket wisata terintegrasi (desa wisata, alam, budaya, kuliner, sport tourism) serta peningkatan klasifikasi desa wisata berkembang	Keberlanjutan dan penguatan branding pariwisata daerah dengan mengokohkan paket wisata terintegrasi, konsistensi penyelenggaraan event, dan pengembangan desa wisata berbasis kelestarian alam sebagai ikon Banyumas	1. Penyelenggaraan Event Pariwisata 2. Pengembangan destinasi dan produk wisata berbasis potensi dan budaya lokal 3. Pengembangan Ekosistem Wisata yang mengintegrasikan produk lokal, objek wisata, dan atraksi budaya 4. Promosi destinasi wisata hingga tingkat Internasional 5. Menciptakan 1 Desa Wisata 1 Influencer 6. Menciptakan 1 Desa Wisata berbasis kelestarian alam atau kebudayaan lokal 7. Fasilitasi Promosi Produk Kreatif Lokal 8. Pembinaan pelaku ekonomi kreatif sub sektor seni pertunjukan dan seni musik
	Penguatan pemasaran pariwisata serta Pengembangan ekosistem wisata yang mengintegrasikan produk lokal, objek wisata dan atraksi budaya	Penguatan citra pariwisata Banyumas melalui branding, promosi dalam–luar negeri, Optimalisasi badan/ tim promosi wisata, serta event budaya sebagai daya tarik unggulan	Penguatan pemasaran pariwisata dengan promosi terpadu, event atraktif, dan peningkatan peran influencer desa wisata	Perluasan promosi pariwisata melalui kolaborasi event dengan swasta dan pengembangan paket wisata antar destinasi	Penguatan promosi pariwisata melalui paket wisata terintegrasi (desa wisata, budaya, alam, kuliner, sport tourism) dengan kolaborasi multi stakeholder	Penguatan branding pariwisata Banyumas dengan ikon paket wisata terintegrasi dan event rutin sebagai daya tarik unggulan	
	Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan Influencer wisata untuk menuju 1 Influencer 1 Desa Wisata serta pemberian Awarding untuk Konten Kreator Wisata	Peningkatan kapasitas anggota dan pengurus Kelompok Sadar Wisata dan SDM Pariwisata	Peningkatan Aktivasi Badan Promosi Wisata (PHRI, Biro wisata dan Tour Guide, Komunitas Wisata lainnya, Tourism Information Center) dalam promosi wisata melalui event kebudayaan	Peningkatan kolaborasi dalam pengelolaan wisata daerah		

	Pengembangan klaster ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan ekonomi kreatif serta Pengembangan sentra industri untuk pelaku usaha kreatif lokal	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pembentukan Klaster, Penguatan SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif					
	Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata	Optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata pada Kawasan Pariwisata, Kawasan Pengembangan PUD					
Kebudayaan	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan Banyumas	Pemetaan potensi seni dan budaya, inventarisasi kelompok seni serta penguatan awal perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi pelaku seni-budaya, penyelenggaraan festival tahunan, serta konsistensi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	Perluasan jangkauan kegiatan budaya melalui festival tingkat kecamatan dan kabupaten, didukung event kebudayaan dan penguatan perlindungan objek budaya	Penguatan ekosistem budaya dengan penguatan identitas daerah melalui festival tahunan di berbagai tingkatan, serta peningkatan kualitas perlindungan dan pengembangan objek budaya.	Keberlanjutan dan penguatan branding daerah berbasis budaya melalui festival budaya berjenjang dan konsistensi pemajuan objek kebudayaan	1. Penyelenggaraan event kebudayaan 2. Revitalisasi sarana dan prasarana kebudayaan 3. Fasilitasi penyelenggaraan pentas seni dan budaya lokal

Sumber: Trilas Bupati Banyumas & RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINPORABUDPAR KABUPATEN BANYUMAS**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/kota;

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota;

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olah Raga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota;
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - 1) Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah;

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

g. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan;
- b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
- c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat;

6. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota.

7. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya;
 - 2) Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya;
 - 3) Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya.

8. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu;

- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum.

9. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;

10. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 3) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;

11. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI;
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata;

- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata;
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - 1) Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif;

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

Periode : 2025-2029
Unker : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Muda	111,43	23,65	385.645.000	37,16	406.900.000	54,05	415.900.000	70,95	425.800.000	87,84	431.000.000	
	Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda	127,27	13,33		36,67		40		53,33		66,67		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,05	0,08	385.645.000	0,09	406.900.000	0,1	415.900.000	0,11	425.800.000	0,13	431.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100	175	161.375.000	200	165.000.000	225	167.400.000	250	170.000.000	275	171.000.000	

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	7	11	179.685.000	12	185.900.000	13	190.500.000	14	195.800.000	15	198.000.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	N/A	29	44.585.000	29	56.000.000	29	58.000.000	29	60.000.000	29	62.000.000	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,04	4,08	96.550.000	5,1	85.000.000	6,12	90.000.000	7,14	93.500.000	8,16	94.800.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	N/A	250	96.550.000	260	85.000.000	270	90.000.000	280	93.500.000	290	94.800.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi olahraga	-13,2	0,92	11.380.894.000	0,93	11.611.900.000	0,94	11.942.800.000	0,95	12.260.400.000	0,96	12.416.100.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan sumber daya keolahragaan	100	100	1.802.689.500	100	1.710.000.000	100	1.820.000.000	100	1.830.000.000	100	1.840.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	N/A	14	1.802.689.500	14	1.710.000.000	14	1.820.000.000	14	1.830.000.000	14	1.840.000.000	

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan event kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten	50	66,67	1.593.092.500	66,67	1.801.900.000	66,67	1.912.800.000	66,67	2.010.400.000	66,67	2.046.100.000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2	1	1.563.092.500	3	1.751.900.000	3	1.852.800.000	3	1.950.400.000	3	1.986.100.000	
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	240	301	30.000.000	310	50.000.000	320	60.000.000	320	60.000.000	320	60.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar	100	100	7.800.000.000	100	7.950.000.000	100	8.000.000.000	100	8.200.000.000	100	8.300.000.000	
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	4	4	7.800.000.000	4	7.950.000.000	4	8.000.000.000	4	8.200.000.000	4	8.300.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase peningkatan event olahraga rekreasi	66,67	40	185.112.000	40	150.000.000	40	210.000.000	40	220.000.000	40	230.000.000	
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	N/A	7	185.112.000	7	150.000.000	7	210.000.000	7	220.000.000	7	230.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan prestasi kepramukaan	N/A	20	1.845.000.000	30	1.882.400.000	40	1.936.000.000	50	1.987.400.000	60	2.012.600.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan	31,11	6,78	1.845.000.000	10,17	1.882.400.000	13,56	1.936.000.000	16,95	1.987.400.000	20,34	2.012.600.000	
	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	N/A	42,86		53,57		60,71		71,43		82,14		

Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	60	65	1.845.000.000	68	1.882.400.000	71	1.936.000.000	74	1.987.400.000	77	2.012.600.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan	N/A	24,75	1.612.496.000,00	37,02	1.645.200.000,00	49,3	1.692.000.000,00	61,97	1.737.000.000,00	74,65	1.759.000.000,00	
	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	10,68	12,46		13,65		14,84		16,02		17,21		
	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	N/A	4		6		8		10		12		
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan yang dikelola	44,65	55,71	460.000.000,00	61,19	472.704.000,00	66,67	499.504.000,00	72,33	524.504.000,00	77,99	559.000.000,00	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	16	25	300.000.000,00	27	350.000.000,00	29	319.504.000,00	30	334.504.000,00	32	400.000.000,00	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30	70	160.000.000,00	80	122.704.000,00	90	180.000.000,00	100	190.000.000,00	110	159.000.000,00	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	63,83	74,47	1.032.496.000,00	78,72	1.032.496.000,00	82,98	1.032.496.000,00	91,49	1.032.496.000,00	100	1.000.000.000,00	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	18	25	1.032.496.000,00	27	1.032.496.000,00	29	1.032.496.000,00	30	1.032.496.000,00	32	1.000.000.000,00	

Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat	50	71,43	120.000.000,00	78,57	140.000.000,00	85,71	160.000.000,00	92,86	180.000.000,00	100	200.000.000,00	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8	12	120.000.000,00	16	140.000.000,00	20	160.000.000,00	24	180.000.000,00	28	200.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan pembinaan objek sejarah lokal	100	100	40.925.000,00	100	41.700.000,00	100	42.800.000,00	100	43.900.000,00	100	44.400.000,00	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase objek sejarah yang dibina	N/A	11,11	40.925.000,00	22,22	41.700.000,00	33,33	42.800.000,00	44,44	43.900.000,00	55,56	44.400.000,00	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	N/A	80	40.925.000,00	100	41.700.000,00	120	42.800.000,00	140	43.900.000,00	160	44.400.000,00	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan cagar budaya yang dilestarikan	11,28	12,84	621.158.000,00	13,62	633.700.000,00	14,4	651.700.000,00	15,18	669.000.000,00	15,95	677.400.000,00	
	Persentase Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	15,32	22,57		26,46		30,35		34,24		38,13		
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelestarian cagar budaya	12,1	14,79	621.158.000,00	16,34	633.700.000,00	17,9	651.700.000,00	19,46	669.000.000,00	21,01	677.400.000,00	
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	7	17	254.790.000,00	18	258.700.000,00	19	251.700.000,00	20	244.000.000,00	21	227.400.000,00	
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	N/A	39	150.443.000,00	40	145.000.000,00	41	155.000.000,00	42	165.000.000,00	43	175.000.000,00	

Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	15	25	215.925.000,00	26	230.000.000,00	27	245.000.000,00	28	260.000.000,00	29	275.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi museum yang terdigitalisasi	70,98	74,66	917.805.433,00	76,49	936.400.000,00	79,25	963.000.000,00	82	988.600.000,00	84,76	1.001.100.000,00	
	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	-0,6	4		6		8		10		12		
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase koleksi museum yang dikelola	39,18	48,97	917.805.433,00	53,87	936.400.000,00	58,77	963.000.000,00	63,66	988.600.000,00	68,56	1.001.100.000,00	
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	400	500	264.003.136,00	600	280.000.000,00	610	280.000.000,00	620	285.000.000,00	640	286.100.000,00	
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	7	8	573.791.145,00	9	583.000.000,00	10	583.000.000,00	11	583.600.000,00	12	585.000.000,00	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	8	10	80.010.719,00	12	73.400.000,00	14	100.000.000,00	16	120.000.000,00	18	130.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-4,95	0,96		1,27		1,88		2		2,26		
	Tingkat hunian akomodasi	36,24	36,28		36,3		36,32		36,34		36,36		
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok sadar wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	55,26	57,5	720.760.000,00	58,54	745.700.000,00	59,52	758.000.000,00	60,47	770.600.000,00	61,36	778.500.000,00	

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	N/A	40	720.760.000,00	40	745.700.000,00	40	758.000.000,00	40	770.600.000,00	40	778.500.000,00	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	N/A	100	735.404.000,00	100	740.000.000,00	100	770.000.000,00	100	798.000.000,00	100	810.000.000,00	
	Persentase peningkatan jumlah Desa Wisata	-4,76	10		15		20		25		30		
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan oleh Pemkab	17	18	735.404.000,00	20	740.000.000,00	20	770.000.000,00	20	798.000.000,00	20	810.000.000,00	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan event yang diselenggarakan	90	21,05	3.414.340.000,00	31,58	3.483.600.000,00	42,11	3.582.800.000,00	52,63	3.678.100.000,00	63,16	3.724.800.000,00	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata	32,94	5,37	3.414.340.000,00	9,27	3.483.600.000,00	13,17	3.582.800.000,00	17,07	3.678.100.000,00	20,98	3.724.800.000,00	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	40	60	119.099.850,00	70	150.000.000,00	80	200.000.000,00	90	250.000.000,00	100	300.000.000,00	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	4	2.818.169.235,00	4	2.803.600.000,00	4	2.802.800.000,00	4	2.798.100.000,00	4	2.744.800.000,00	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	24	24	477.070.915,00	24	530.000.000,00	24	580.000.000,00	24	630.000.000,00	24	680.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	4,62	10,25	395.079.000,00	15,76	403.000.000,00	21,55	414.400.000,00	27,63	425.400.000,00	34,01	430.800.000,00	

	Persentase peningkatan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	5,69	18		24,15		30,31		36,46		42,62		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekraf yang bersertifikat	5,69	6,31	255.079.000,00	6,46	263.000.000,00	6,62	274.400.000,00	6,77	285.400.000,00	6,92	290.800.000,00	
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	N/A	160	125.079.000,00	170	130.000.000,00	180	130.000.000,00	190	130.000.000,00	210	130.000.000,00	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	25	25	50.000.000,00	75	73.000.000,00	100	84.400.000,00	125	80.000.000,00	150	84.800.000,00	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	N/A	40	80.000.000,00	80	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	75.400.000,00	100	76.000.000,00	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Sentra Industri untuk Pelaku Usaha Kreatif Lokal yang terbentuk	1	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilaksanakan	N/A	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	2	140.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		100		
	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah	N/A	80		82		84		86		88		

	bernilai sedang - sangat tinggi												
	Nilai kematangan organisasi	49	49		50		50		50		50		
	IKM Perangkat Daerah XXX	90,75	91,25		91,5		91,75		92		92,25		
	IKM Layanan Umum Perangkat Daerah	90,75	91,25		91,5		91,75		92		92,25		
	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100		100		100		100		100		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	N/A	100	31.035.000.000,00	100	31.040.000.000,00	100	31.045.000.000,00	100	31.050.000.000,00	100	31.055.000.000,00	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	135	12.539.561.041,00	135	11.611.507.339,00	135	11.711.349,00	135	11.859.079.885,00	135	11.231.297.954,00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	5	35.000.000,00	5	40.000.000,00	5	45.000.000,00	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	

	Daerah dengan penilaian kinerja baik												
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	135	50.000.000,00	135	50.000.000,00	135	50.000.000,00	135	55.000.000,00	135	55.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	692.500.000,00	100	710.000.000,00	100	787.500.000,00	100	810.000.000,00	100	827.500.000,00	
	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	47,08	55		60		65		70		75		
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	135.000.000,00	3	135.000.000,00	4	160.000.000,00	4	160.000.000,00	4	160.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	180	200	300.000.000,00	200	300.000.000,00	250	325.000.000,00	250	325.000.000,00	250	325.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00	200	25.000.000,00	200	25.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	100	200.000.000,00	100	215.000.000,00	100	230.000.000,00	100	245.000.000,00	100	260.000.000,00	

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	7.500.000,00	2	10.000.000,00	2	12.500.000,00	2	15.000.000,00	2	17.500.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	N/A	100	270.000.000,00	100	270.000.000,00	100	365.000.000,00	100	390.000.000,00	100	390.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	6	175.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	1.458.000.000,00	100	1.483.000.000,00	100	1.510.000.000,00	100	1.535.000.000,00	100	1.560.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	12	650.000.000,00	12	675.000.000,00	12	700.000.000,00	12	725.000.000,00	12	750.000.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	12	800.000.000,00	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	100	380.000.000,00	100	437.000.000,00	100	499.000.000,00	100	586.000.000,00	100	643.000.000,00	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	30	120.000.000,00	30	120.000.000,00	30	120.000.000,00	35	150.000.000,00	35	150.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	10	10.000.000,00	12	12.000.000,00	14	14.000.000,00	16	16.000.000,00	18	18.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	60	40.000.000,00	60	45.000.000,00	60	50.000.000,00	60	55.000.000,00	60	60.000.000,00	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	100	100	43.800.000,00	100	50.800.000,00	100	57.800.000,00	100	64.800.000,00	100	71.800.000,00	
	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	100	100		100		100		100		100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	35.000.000,00	4	40.000.000,00	4	45.000.000,00	4	50.000.000,00	4	55.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	2	8.800.000,00	2	10.800.000,00	2	12.800.000,00	2	14.800.000,00	2	16.800.000,00	

Periode
Unker

: 2025-2029
: UPTD PELAYANAN PARIWISATA TERATAI MAS

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	12.210.627.000,00	100	12.479.260.794,00	100	12.753.804.531,00	100	13.034.388.231,00	100	13.321.144.772,00	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian kinerja keuangan BLUD	20	20	12.210.627.000,00	20	12.479.260.794,00	20	12.753.804.531,00	20	13.034.388.231,00	20	13.321.144.772,00	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20	20	12.210.627.000,00	20	12.479.260.794,00	20	12.753.804.531,00	20	13.034.388.231,00	20	13.321.144.772,00	

Periode
Unker

: 2025-2029
: UPTD PELAYANAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PURWOMAS

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	3.437.523.718,00	100	4.581.102.020,00	100	4.823.268.810,00	100	5.064.432.249,00	100	5.216.987.273,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	28	48	505.603.662,00	48	549.587.662,00	48	573.891.685,00	48	602.586.268,00	48	620.663.854,00	
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	3	63.507.200,00	3	63.507.200,00	3	63.507.200,00	3	66.682.560,00	3	68.683.036,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	3	47.193.900,00	3	47.193.900,00	3	49.553.595,00	3	52.031.274,00	3	53.592.212,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	15	121.201.000,00	15	121.201.000,00	15	127.261.050,00	15	133.624.102,00	15	137.632.825,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	4	235.810.000,00	4	235.914.000,00	4	247.709.700,00	4	260.095.185,00	4	267.898.040,00	
Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	8	6.781.562,00	8	6.781.562,00	8	7.120.640,00	8	7.476.672,00	8	7.700.972,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	15	31.110.000,00	15	74.990.000,00	15	78.739.500,00	15	82.676.475,00	15	85.156.769,00	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	4	227.821.000,00	4	332.906.000,00	4	366.196.600,00	4	384.506.430,00	4	396.041.622,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	4	227.821.000,00	4	332.906.000,00	4	366.196.600,00	4	384.506.430,00	4	396.041.622,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24	2.172.619.056,00	24	2.650.083.358,00	24	2.782.587.525,00	24	2.921.716.901,00	24	3.009.990.468,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12	26.867.960,00	12	28.211.358,00	12	29.621.925,00	12	31.103.021,00	12	32.658.172,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.145.751.096,00	12	2.621.872.000,00	12	2.752.965.600,00	12	2.890.613.880,00	12	2.977.332.296,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	17	14	531.480.000,00	14	1.048.525.000,00	14	1.100.593.000,00	14	1.155.622.650,00	14	1.190.291.329,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	6	38.660.000,00	6	38.660.000,00	6	40.593.000,00	6	42.622.650,00	6	43.901.329,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	8	492.820.000,00	8	1.009.865.000,00	8	1.060.000.000,00	8	1.113.000.000,00	8	1.146.390.000,00	

Periode
Unker

: 2025-2029
: UPTD PENGELOA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA (GOR Satria Purwokerto)

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	2.499.350.275,00	100	2.590.129.847,00	100	2.673.663.650,00	100	2.771.299.635,00	100	3.312.870.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	24	466.711.195,00	24	466.711.195,00	24	482.946.200,00	24	506.818.510,00	24	531.880.000,00	
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	3	27.278.250,00	3	27.278.250,00	3	28.642.200,00	3	30.074.310,00	3	31.578.500,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	225.525.445,00	2	225.525.445,00	2	236.801.800,00	2	248.641.890,00	2	261.074.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	10	61.893.500,00	10	61.893.500,00	10	64.988.200,00	10	68.237.610,00	10	71.649.500,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	2	101.910.000,00	2	101.910.000,00	2	101.910.000,00	2	107.005.500,00	2	112.355.800,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.500.000,00	2	7.600.000,00	2	7.700.000,00	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	5	43.104.000,00	5	43.104.000,00	5	43.104.000,00	5	45.259.200,00	5	47.522.200,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	5	84.772.500,00	5	84.772.500,00	5	84.772.500,00	5	89.011.125,00	5	93.461.700,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	5	84.772.500,00	5	84.772.500,00	5	84.772.500,00	5	89.011.125,00	5	93.461.700,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	14	1.389.361.080,00	14	1.480.140.652,00	14	1.524.641.700,00	14	1.570.228.500,00	14	1.631.855.300,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	2	4.842.000,00	2	4.842.000,00	2	5.084.100,00	2	5.084.100,00	2	5.338.500,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.384.519.080,00	12	1.475.298.652,00	12	1.519.557.600,00	12	1.565.144.400,00	12	1.626.516.800,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	N/A	20	558.505.500,00	20	558.505.500,00	20	581.303.250,00	20	605.241.500,00	20	1.055.673.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	102.540.000,00	10	102.540.000,00	10	102.540.000,00	10	102.540.000,00	10	527.836.500,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	455.965.500,00	10	455.965.500,00	10	478.763.250,00	10	502.701.500,00	10	527.836.500,00	

Tabe1 4.2

Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Keterangan
Meningkatnya Prestasi Pemuda Dan Olahraga Serta Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata Berbasis Potensi Lokal Dan Kebudayaan				Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Persentase peningkatan Pemajuan Kebudayaan		
	Menguatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga			Tingkat Prestasi Pemuda Tingkat Prestasi Olahraga		
		Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan		Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Muda Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Optimalnya penguatan kapasitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	

			Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Optimalnya pemberdayaan organisasi kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kapasitas daya saing olahraga		Persentase peningkatan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Optimalnya penguatan sumber daya keolahragaan	Persentase pemberdayaan sumber daya keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			Meningkatnya ruang peningkatan daya saing keolahragaan	Persentase peningkatan event kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	

			Meningkatnya Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			Optimalnya pelaksanaan standar nasional pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
			Meningkatnya pemasaran olahraga masyarakat	Persentase peningkatan event olahraga rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			Meningkatnya Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
		Meningkatnya kapasitas kepramukaan		Persentase peningkatan prestasi kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Optimalnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan			Tingkat Pemajuan Kebudayaan		
		Meningkatnya pengembangan kebudayaan		Persentase peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	

				Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir		
			Optimalnya pengelolaan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikelola	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			Optimalnya pelestarian kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			Optimalnya pembinaan sumber daya kebudayaan	Persentase Pembinaan Lembaga Adat	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
		Meningkatnya pembinaan objek sejarah lokal		Persentase peningkatan pembinaan objek sejarah lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
			Optimalnya pembinaan objek sejarah lokal	Persentase objek sejarah yang dibina	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya		Persentase peningkatan cagar budaya yang dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

				Persentase Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan		
			Optimalnya pengelolaan cagar budaya	Persentase tingkat pelestarian cagar budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Pelindungan Cagar Budaya	
			Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Pengembangan Cagar Budaya	
			Meningkatnya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Cagar Budaya	
		Meningkatnya tata kelola museum		Persentase koleksi museum yang terdigitalisasi Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
			Optimalnya pengelolaan permuseuman	Persentase koleksi museum yang dikelola	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
			Meningkatnya Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
			Meningkatnya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		
		Meningkatnya daya tarik wisata		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	

				Tingkat hunian akomodasi		
			Optimalnya peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata	Persentase Kelompok sadar wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Optimalnya pengelolaan destinasi wisata	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Persentase peningkatan jumlah Desa Wisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan oleh Pemkab	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya promosi pariwisata		Persentase peningkatan event yang diselenggarakan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Optimalnya promosi wisata	Persentase peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Menguatnya Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	

		Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif Persentase peningkatan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Optimalnya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Kepariwisata dan Ekraf yang bersertifikat	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			Berkembangnya Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Meningkatnya Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
			Meningkatnya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Sentra Industri untuk Pelaku Usaha Kreatif Lokal yang terbentuk	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilaksanakan	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian Dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SPIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah		

		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi Nilai kematangan organisasi IKM Perangkat Daerah XXX IKM Layanan Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Table 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik wisata	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Mendukung Trilas Program Memajukan Seni Budaya dan Prestasi Olahraga Banyumas
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Mendukung Trilas Program Memajukan Seni Budaya dan Prestasi Olahraga Banyumas
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya daya saing olahraga	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota	Mendukung Trilas Program Memajukan Seni Budaya dan Prestasi Olahraga Banyumas
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	

4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Mendukung Trilas Program Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
			Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	

5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Mendukung Trilas Program Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya promosi pariwisata	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Mendukung Trilas Program Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik wisata	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Mendukung Trilas Program Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Mendukung Trilas Program Pengembangan Desa Wisata dengan melibatkan BUMDES
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

9	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik wisata	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Mendukung Trilas Program Pengembangan Desa Wisata dengan melibatkan BUMDES
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Mendukung Trilas Program Pengembangan Desa Wisata dengan melibatkan BUMDES
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	
11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya promosi pariwisata	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Mendukung Trilas Program Pengembangan Desa Wisata dengan melibatkan BUMDES
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	

Table 4.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Banyumas

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	2,40	4,79	9,25	13,36	17,47	21,58	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,093	0,105	0,117	0,13	0,145	0,165	
	Persentase peningkatan Pemajuan Kebudayaan	%	6,45	19,35	25,81	35,48	51,61	67,74	
1.1	Tingkat Prestasi Pemuda	%	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,027	
	Tingkat Prestasi Olahraga	%	0,073	0,075	0,078	0,081	0,084	0,087	

1.2	Tingkat Pemajuan Kebudayaan	%	63,46	71,15	75	80,77	90,38	100	
1.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Angka	6,23	6,71	7,39	8,15	8,97	9,54	
1.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,5	87,6	87,7	87,8	87,9	88,0	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,52	3,53	3,55	3,75	3,8	4,0	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,52	3,53	3,55	3,75	3,80	4,00	

Table 4.5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemuda,Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Banyumas

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Muda	%	13,51	23,65	37,16	54,05	70,95	87,84	
2	Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda	%	6,67	13,33	36,67	40,00	53,33	66,67	
3	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	0,92	1,84	3,23	4,15	5,07	5,99	
4	Persentase peningkatan prestasi kepramukaan	%	10	20	30	40	50	60	
5	Persentase peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	12,47	24,75	37,02	49,3	61,97	74,65	
6	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	11,57	12,46	13,65	14,84	16,02	17,21	
7	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	51	52	53	54	55	56	
8	Persentase peningkatan pembinaan objek sejarah lokal	%	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase peningkatan cagar budaya yang dilestarikan	%	12,06	12,84	13,62	14,4	15,18	15,95	

10	Persentase Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	18,68	22,57	26,46	30,35	34,24	38,13	
11	Persentase koleksi museum yang terdigitalisasi	%	72,82	74,66	76,49	79,25	82	84,76	
12	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	%	2	4,03	6,02	8,02	10,02	12,02	
13	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	0,71	0,96	1,27	1,88	2	2,26	
14	Tingkat hunian akomodasi	%	36,26	36,28	36,30	36,32	36,34	36,36	
15	Persentase peningkatan event yang diselenggarakan	%	10,53	21,05	31,58	42,11	52,63	63,16	
16	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	5	10,25	15,76	21,55	27,63	34,01	
17	Persentase peningkatan SDM Kepariwisataa n dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat	%	11,85	18	24,15	30,31	36,46	42,62	
18	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A	80	82	84	86	88	

20	Nilai kematangan organisasi	Angka	49	49	50	50	50	50	
21	IKM Perangkat Daerah XXX	Angka	91	91,25	91,5	91,75	92	92,25	
22	IKM Layanan Umum Perangkat Daerah	Angka	91	91,25	91,5	91,75	92	92,25	
23	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	

Table 4.6
Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Tahun 2025-2029
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Banyumas

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga serta meningkatnya pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal dan kebudayaan	1	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Partisipasi pemuda rendah dalam kegiatan olahraga	Kurang sosialisasi, kurangnya minat dan motivasi	Rendahnya basis calon atlet berprestasi	Masyarakat (Pemuda dan Atlet)	Membuat event perlombaan bagi atlet berusia pemuda (16-30th)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Sosialisasi 2. Pelatihan Pelatih dan instruktur olahraga 3. Lomba atau Event kejuaraan	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar
		2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Keterbatasan infrastruktur pariwisata	Akses transportasi, hotel, fasilitas umum kurang memadai	Wisatawan enggan berkunjung, daya tarik menurun	Pemda dan Masyarakat (Pelaku Wisata, Stakeholder)	Mengadakan FGD dan kerjasama dengan stakeholder terkait	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengembangan infrastruktur dasar penunjang pariwisata	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar
		3	Persentase peningkatan Pemajuan Kebudayaan	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan	Kurangnya sosialisasi, rendahnya minat generasi muda	Pelestarian budaya melemah, capaian indikator rendah	Masyarakat (Seniman dan Budayawan)	Mengadakan event dan pementasan kesenian	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Sosialisasi 2. Festival budaya 3. Integrasi budaya dalam pendidikan	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar

1.1	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	1.1	Tingkat Prestasi Pemuda	Rendahnya Daya Saing Pemuda	Minimnya Fasilitas Untuk Mengasah Kemampuan Pemuda (dalam hal ini event berbentuk perlombaan) Event Pemerintah Daerah yang berbeda bedakan	Minimnya Prestasi dan Ajang Mengasah Kemampuan	Masyarakat (Pemuda dan Pelajar)	Membuat event perlombaan bagi pemuda contoh : seleksi pemuda pelopor dan seleksi jambore pemuda	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Fasilitas Membuat Lomba Bagi Pemuda 2. Kolaborasi dengan Stakeholder terkait (Lomba) 3. Membuat Event Festival Umum (Musik, Kebudayaan, Karya Ilmiah) 4. Melibatkan Org. Kepemudaan dan Instansi Pendidikan (SMA dan Universitas)	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar
			Tingkat Prestasi Olahraga	Keterbatasan sarana & prasarana olahraga	Fasilitas kurang memadai/berstandar	Atlet kesulitan latihan optimal	Masyarakat dan Atlet	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai cabang olahraga 2. Pelatihan pelatih dan instruktur olahraga 3. Mengadakan kejuaraan olahraga	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar
1.2	Meningkatnya pembangunan Kebudayaan	1.2	Tingkat Pemajuan Kebudayaan	Kualitas SDM pengelola kebudayaan rendah	Kurang pelatihan, minim tenaga ahli kebudayaan	Program kebudayaan kurang efektif	Masyarakat (Seniman dan Budayawan)	Sertifikasi tenaga ahli kebudayaan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Capacity building 2. Sertifikasi tenaga kebudayaan 3. Kerja sama dengan unsur pendidikan	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar
1.3	Meningkatnya pengembangan pariwisata	1.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung ke daya tarik wisata yang dimiliki pemda	Kurangnya inovasi pada daya tarik wisata milik pemda	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan pada daya tarik wisata milik pemda	Pemerintah	Penambahan atraksi dan sarpras di daya tarik wisata milik pemda	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Lebih gencar melakukan promosi wisata di berbagai media	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kurangnya event wisata yang menarik	Minim inovasi, kalender event tidak konsisten	PAD sektor pariwisata (retribusi, pajak hotel, restaurant dan hiburan) kurang optimal	Pemerintah	Melakukan koordinasi dengan para EO	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penyelenggaraan event rutin 2. Festival unggulan tahunan	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar

1.4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator kinerja perangkat daerah tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)	Kurang koordinasi antar bagian	Pengukuran capaian kinerja tidak valid	OPD	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Monitoring khusus tindak lanjut rekomendasi 2. Rapat evaluasi rutin	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	SDM pengelola SPIP pada OPD terbatas	Tidak ada pejabat fungsional khusus SPIP	Laporan lambat, pengendalian lemah	OPD	Sosialisasi budaya integritas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penyusunan dan penegakan SOP SPIP 2. Monitoring dan evaluasi internal	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Rendahnya inovasi pelayanan publik	SDM belum dilatih, SOP tidak jelas / tidak dijalankan	Indeks stagnan, nilai reformasi birokrasi rendah	Masyarakat	Penyediaan kanal pengaduan (online & offline)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Review & penetapan SPM 2. Sosialisasi SOP 3. Penerapan standar pelayanan ramah disabilitas	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, 2030	Dinporabudpar

Tabel 4.7

Rencana Pengendalian/Perbaikan atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Banyumas

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur	Pengendalian yang Ada	Efektivitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2023-2024 No 700/NON.PKPT/277/IRBAN.2/ST.025/2024 tanggal 17 Desember 2024	Kurang optimalnya implementasi bagi pegawai	Adanya sosialisasi dan penyusunan SK Kepala Dinas	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Sudah diadakan sosialisasi penyusunan SPIP internal terhadap pegawai dan disusun SK Tim Penyusunan SPIP	E	1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;	Sudah dilakukan penginputan di aplikasi SPIP	Kepala Dinas	Tahun 2024-2025
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif pada Dinporabudpar Kab. Banyumas No 700/169.PKPT/314/IRBAN.2/ST.111/2023 tanggal 15 Januari 2024	Kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja oleh pegawai (ASN dan Non ASN)	Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja ASN dan tenaga Non ASN serta mendokumentasikan dengan tertib	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Sudah dilaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja ASN dan tenaga Non ASN	E	1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;	Pelaksanaan kinerja ASN dan tenaga Non ASN sudah tertib	Kepala Dinas	Tahun 2024-2025
3	LHP No 700/161.PKPT/021/IRBAN.2/ST/069/2024/2024 tanggal 15 Januari 2024	Prosedur penggunaan sarana dan prasarana (kendaraan dinas operasional) tidak sesuai ketentuan	Pengurus barang telah memperbarui data pemakai kendaraan dinas operasional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Pemerintah Kab. Banyumas	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Adanya SK Penggunaan Barang bulan Mei dan bulan Juni tahun 2025	E	1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;	Tersedianya Berita Acara Serah Terima Pemegang Kendaraan Dinas	Kepala Dinas	Tahun 2024-2025

4	LHP No 700/161.PKPT/021/IRBAN.2/ST/069/2024/2024 tanggal 15 Januari 2024	Prosedur pinjam pakai sarana prasarana (kendaraan roda 4) tidak sesuai ketentuan	Pengurus barang telah menyiapkan dokumen pinjam pakai kendaraan dinas sesuai ketentuan Perbup Banyumas yang mengatur Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Pengurus barang sudah membuat dokumen BA pinjam Pakai antara Pejabat penatausahaan barang dengan pemakai kendaraan dinas	E	1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;	Pengurus barang sudah membuat dokumen BA pinjam Pakai antara Pejabat penatausahaan barang dengan pemakai kendaraan dinas	Kepala Dinas	Tahun 2024-2025
---	--	---	--	---	---	---	---	---	-----------------	--------------------

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Setiap bidang pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik- baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap bidang di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 19 Agustus 2025
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas



Drs. SETIA RAHENDRA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660127 198607 1 001